

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini melihat hubungan China – Afghansitan dibawah rezim Taliban di 2021 lalu dari perspektif kepentingan nasional China. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan: *faktor yang melatarbelakangi hubungan bilateral China dengan Taliban periode 2021 – 2024.*

Hubungan bilateral antara China dan Taliban pasca-pengambilalihan Kabul pada Agustus 2021 mencerminkan dinamika yang sangat ditentukan oleh kepentingan China atas stabilitas keamanan di perbatasan barat China. Dari perspektif kebijakan luar negeri China, hubungan ini tidak dibangun atas dasar solidaritas regional atau keinginan untuk memperkuat pemerintahan Taliban semata, melainkan dilandaskan pada kepentingan nasional China. Faktor-faktor yang melatarbelakangi hubungan bilateral tersebut dapat dipahami melalui tiga kerangka utama: keamanan, ekonomi, dan pencitraan politik China sebagai kekuatan besar.

Pertama, keamanan menjadi kepentingan paling fundamental dalam membentuk kedekatan diplomatik China dengan Taliban. Provinsi Xinjiang yang berbatasan langsung dengan Afghanistan telah lama menjadi wilayah rawan bagi keamanan nasional China, terutama karena keberadaan kelompok separatis seperti *East Turkestan Islamic Movement (ETIM)* atau *Turkestan Islamic Party (TIP)*, serta kelompok ekstremis lintas batas seperti *Islamic State Khorasan Province (IS-K)*. Keterlibatan China dengan Taliban didorong oleh kekhawatiran bahwa wilayah Afghanistan dapat kembali menjadi tempat berlindung atau pelatihan dan sarang kelompok-kelompok terorisme, serta penyebaran ideologi ekstrimis. Oleh karena itu, sejak awal interaksi dengan Taliban, termasuk dalam pertemuan bilateral di Tianjin pada Juli 2021, China menekankan syarat keamanan sebagai prasyarat utama dalam setiap kerja sama lebih lanjut. Beijing memproyeksikan dirinya sebagai negara yang mempunyai kepentingan dalam menjaga keamanan perbatasan dan mencegah ekspansi ideologi ekstremis yang dapat menembus wilayah

domestiknya melalui celah keamanan di Afghanistan. Taliban, dalam hal ini, diharapkan menjadi mitra pragmatis yang mampu membantu menjaga stabilitas regional demi kepentingan bersama.

Kedua, kepentingan ekonomi China terhadap Taliban juga menjadi kepentingan China, namun bukan sebagai faktor utama, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan keamanan dan politik yang lebih besar. Keterlibatan China dalam proyek ekonomi seperti tambang tembaga Mes Aynak dan eksplorasi minyak di Cekungan Amu Darya lebih mencerminkan strategi jangka panjang atau sebagai “alat tukar” bagi China, ketimbang bentuk investasi aktif yang sesungguhnya. Kedua proyek tersebut telah menunjukkan tanda-tanda stagnasi yang signifikan karena kombinasi dari ketidakpastian keamanan, kelemahan struktural pemerintahan Taliban, dan keengganan investor China mengambil risiko besar di Taliban yang tidak stabil. Lebih dari itu, Beijing melihat keterlibatan ekonomi sebagai bentuk *leverage* terhadap Taliban. Dengan kata lain, komitmen investasi hanya akan diwujudkan apabila Taliban mampu menunjukkan komitmennya dan kapasitas untuk menjaga stabilitas serta keamanan Afghanistan, terutama dari isu yang mengancam kedua aktor bilateral ini yaitu terorisme. Dalam hal ini, ekonomi menjadi alat negosiasi untuk memperkuat jaminan keamanan, bukan tujuan akhir dari hubungan bilateral itu sendiri.

Proyek *China–Pakistan Economic Corridor* (CPEC), yang merupakan bagian dari *Belt and Road Initiative* (BRI), menjadi dimensi tambahan dalam kepentingan ekonomi-keamanan China di Taliban. Stabilitas Afghanistan dinilai penting bagi kelangsungan proyek ini, terutama karena banyak titik jalur CPEC berbatasan langsung dengan Afghansitan yang rawan akan aktivitas terorisme, seperti Baluchistan dan Khyber Pakhtunkhwa. Oleh karena itu, China berupaya menggunakan jalur diplomasi bilateral dengan Taliban untuk menekankan akan komitmen Taliban dalam menjaga kawasan perbatasan agar tetap kondusif demi keamanan proyek ekonominya. Investasi di Taliban baru akan diwujudkan secara penuh apabila syarat ini terpenuhi.

Ketiga, secara politik, hubungan bilateral ini juga menjadi tanggung bagi China untuk menegaskan posisinya sebagai kekuatan global yang mampu mengisi

kekosongan geopolitik yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan, China bergerak cepat untuk membina hubungan dengan pemerintahan baru, termasuk dengan tidak menarik staf diplomatiknya dari Kabul, mengirim duta besar baru, serta memberikan bantuan kemanusiaan langsung. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya China untuk menciptakan citra sebagai kekuatan besar yang non-intervensif, juga mampu beradaptasi dengan rezim yang tidak mendapatkan pengakuan luas dari komunitas internasional. Dalam konteks ini, hubungan dengan Taliban digunakan sebagai upaya China dalam memperkuat narasi di ranah internasional bahwa China adalah aktor stabilisator, alternatif dari pendekatan hegemoni Barat di Afghanistan.

Hubungan bilateral ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan bagi China. Rezim Taliban masih menunjukkan kelemahan otoritasnya dalam mengontrol kelompok-kelompok militan yang aktif di Afghanistan. Fragmentasi internal dalam struktur Taliban, lemahnya otoritas pusat, serta hubungan ambigu antara beberapa faksi Taliban dengan kelompok ekstremis lintas batas seperti TTP, ETIM, dan Al-Qaeda memperburuk persepsi China terhadap kemampuan Taliban sebagai mitra keamanan yang kredibel. Serangan terhadap warga negara dan aset China yang terjadi pada periode 2023 - 2024 memperkuat keraguan ini. Taliban, meskipun menyatakan kesediaannya menjalin kerja sama strategis dengan Beijing, belum mampu memberikan jaminan dalam menjaga keamanan Afghanistan yang stabil dan berkelanjutan. Ini menyebabkan China tetap menerapkan pendekatan yang pragmatis dalam menjalin keterlibatan ekonomi ataupun politik lebih dalam dengan Taliban.

Taliban akan terus menjadi elemen penting dalam wacana global, khususnya dalam isu keamanan dan nilai-nilai strategis ekonomi. Penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan China terhadap Taliban tidak didorong oleh loyalitas terhadap rezim tertentu, melainkan oleh perhitungan kepentingan nasionalnya sendiri. Bagi China, siapa yang berkuasa di Afghanistan bukanlah hal yang utama selama kepentingannya yang berkaitan dengan stabilitas Xinjiang, keamanan proyek seperti CPEC, tetap terjaga.

China adalah aktor yang pragmatis dan oportunistis; jika situasi keamanan di Afghanistan memburuk akibat ketidakmampuan Taliban menjaga stabilitas internal, maka Beijing kemungkinan besar akan menyesuaikan kembali prioritasnya, termasuk menunda komitmen ekonomi yang lebih besar. Proyek-proyek seperti eksplorasi minyak di Cekungan Amu Darya dan konektivitas darat dalam kerangka BRI dengan Taliban hingga kini masih berada pada tahap awal, dan keberhasilannya sangat bergantung pada perkembangan situasi keamanan di masa mendatang. Meski demikian, peningkatan intensitas kerja sama China dengan Taliban menunjukkan bahwa Beijing memandang kondisi saat ini sebagai peluang strategis yang layak untuk dimanfaatkan secara hati-hati.

Dengan kata lain, selama Taliban mampu memberikan jaminan minimal atas stabilitas kawasan dan komitmen terhadap isu kontra-terorisme, maka hubungan bilateral akan tetap berlangsung. Namun apabila gagal, maka arah diplomasi China kemungkinan akan bergeser atau menjadi lebih tertutup. Penelitian ini menguatkan kesimpulan bahwa keterlibatan China di Taliban lebih bertumpu pada perhitungan geopolitik yang lebih luas dan keamanan strategis daripada motivasi ideologis atau solidaritas pemerintahan, mencerminkan pola diplomasi bilateral yang bersifat transaksional dan berbasis kepentingan nasional jangka panjang.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan China dalam hubungan bilateral dengan Taliban pasca-2021 terutama didorong oleh kepentingan nasionalnya, yang berakar pada tiga dimensi utama: keamanan internal, stabilitas Xinjiang, dan keberlangsungan proyek ekonomi strategis seperti *China–Pakistan Economic Corridor* (CPEC) dibawah *Belt and Road Initiative* (BRI). Oleh karena itu, dalam praktik diplomatik dan kerja sama internasional ke depan, aktor-aktor negara seperti China diharapkan secara lebih transparan dan konsisten dalam mengintegrasikan kepentingan nasionalnya.

Bagi pembuat kebijakan luar negeri China, penting untuk menyadari bahwa dukungan terhadap Afghanistan di bawah Taliban tidak cukup hanya berbentuk komitmen ekonomi simbolik atau tuntutan keamanan sepihak. Sebaliknya, hubungan bilateral akan lebih berkelanjutan jika didasarkan pada prinsip timbal balik yakni memastikan bahwa investasi China membawa manfaat nyata bagi penduduk lokal Afghanistan, sekaligus memberi jaminan keamanan bagi proyek-proyek vital China. Beijing perlu membangun skema kerja sama yang bukan hanya aman secara jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Di sisi lain, penting juga bagi China untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari proyek-proyek besar di Taliban. Strategi ekonomi yang terlalu eksploitatif, seperti yang dikhawatirkan terjadi dalam proyek tambang Mes Aynak atau eksplorasi minyak di Amu Darya, berpotensi menciptakan resistensi dari komunitas lokal dan memperburuk citra China di mata publik. Hal ini pada akhirnya dapat melemahkan posisi diplomatik China dan menimbulkan hambatan bagi kepentingan di jangka panjangnya.

Sikap koersif China terhadap komunitas Uyghur di Xinjiang juga dapat menjadi keresahan dalam membangun narasi bahwa Beijing adalah mitra yang adil dan stabil di kawasan. Penghapusan budaya dan identitas lokal sebagai bagian dari agenda stabilitas domestik justru dapat memperkuat narasi kelompok separatis dan ekstremis yang mengancam keamanan nasional China itu sendiri. Oleh karena itu,

pendekatan yang lebih inklusif dan memperhatikan dimensi sosial-budaya di wilayah-wilayah sensitif seperti Xinjiang seharusnya menjadi bagian dari kalkulasi kepentingan nasional China ke depannya; Bukan hanya untuk keamanan domestik, tetapi juga untuk memastikan keberhasilan strategi luar negeri di kawasan perbatasan seperti Afghanistan.

5.2.2 Saran Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi awal dalam pengembangan kajian teoritis mengenai konstruksi kepentingan nasional negara besar, seperti China, melalui pendekatan kerjasama bilateral yang bersifat non-intervensi. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan konstruktivis dalam menjelaskan bagaimana negara membentuk dan mendefinisikan kepentingannya, bukan hanya berdasarkan kalkulasi rasional material, tetapi juga melalui narasi identitas, persepsi ancaman, dan representasi ideologis terhadap pihak lain.

Pendekatan Jutta Weldes tentang bagaimana *representasi* dibentuk oleh elite negara dalam mendefinisikan "diri" dan "musuh" menunjukkan bahwa kepentingan nasional tidak bersifat tetap, melainkan dikonstruksi melalui proses diskursus. Dalam konteks China, konstruksi identitas sebagai aktor stabilisator dan kekuatan besar yang bertanggung jawab dalam kawasan menciptakan kebutuhan akan stabilitas perbatasan baratnya, sehingga menjadikan Afghanistan sebagai ranah kepentingan yang tidak dapat diabaikan. Penulis berharap semoga penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penggunaan teori konstruktivis dalam merancang kepentingan nasional serta dalam melihat dinamika kebijakan luar negeri negara besar dalam perspektif lain.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk memperluas studi mengenai bagaimana konstruksi kepentingan nasional terbentuk dalam hubungan bilateral lainnya, terutama antara aktor negara besar dan aktor non-negara atau pemerintah yang belum mendapatkan legitimasi internasional penuh. Hubungan China dengan Taliban pasca-2021 menjadi studi kasus unik dalam hal ini, karena memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip tradisional seperti *non-interference*, *sovereignty*, dan

pragmatism dikombinasikan dengan kepentingan strategis dan ekonomi yang bersifat adaptif.

Di samping itu, studi ke depan dapat menggali lebih dalam bagaimana perbedaan ideologi, struktur politik, dan persepsi terhadap legitimasi memengaruhi proses diskursif dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Penelitian ini juga membuka ruang untuk mengeksplorasi bagaimana hubungan bilateral digunakan sebagai alat untuk mengukuhkan narasi domestik sebuah negara mengenai perannya di panggung internasional.

Penelitian selanjutnya juga bisa memanfaatkan data primer seperti wawancara dengan akademisi, diplomat, atau analisis wacana kebijakan luar negeri dari institusi resmi China seperti Kementerian Luar Negeri China. Dengan demikian, proses konstruksi kepentingan nasional dapat dikaji secara lebih mendalam tidak hanya dari sisi konseptual, tetapi juga melalui praktik politik luar negeri yang konkret dan dapat diverifikasi.